

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen vital dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, kebijakan ini diimplementasikan oleh Bank Indonesia (BI) dengan tujuan utama untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, jumlah uang beredar menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi ekonomi. Menurut data Bank Indonesia, jumlah uang beredar mengalami fluktuasi yang signifikan selama dua dekade terakhir, yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan moneter yang diterapkan. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter memiliki tugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang tepat dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan cara mengontrol inflasi, mempengaruhi suku bunga, dan mengatur likuiditas dalam sistem keuangan.

Sejak krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI sering kali menjadi sorotan, terutama dalam konteks bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan, pada gilirannya, stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hubungan antara

kebijakan moneter dan jumlah uang beredar, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Setiap instrumen memiliki efek yang berbeda terhadap jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi. Misalnya, penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah uang beredar. Namun, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat, hal ini dapat menyebabkan inflasi.

Stabilitas ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar meningkat secara drastis tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sesuai, hal ini dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu ketat, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah uang beredar dan bagaimana hal ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

Kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur jumlah uang beredar di suatu negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mencakup pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi jumlah uang beredar, tetapi juga berdampak langsung pada

tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam jumlah uang beredar yang berhubungan langsung dengan perubahan kebijakan moneter yang diambil.

Dalam konteks perekonomian Indonesia, kebijakan moneter memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini diimplementasikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masalah yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter mencakup berbagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Misalnya, ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga, hal ini akan mendorong bank untuk memberikan pinjaman lebih banyak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Akibatnya, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman akan meningkat, yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan moneter dapat langsung mempengaruhi likuiditas dalam perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menggerogoti daya beli masyarakat,

sementara nilai tukar yang tidak stabil dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan investasi. Oleh karena itu, pengendalian jumlah uang beredar menjadi sangat penting. Misalnya, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang parah, di mana jumlah uang yang beredar meningkat pesat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang nyata. Hal ini menyebabkan hiperinflasi dan penurunan tajam dalam nilai tukar rupiah. Krisis tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengaturan jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Lebih lanjut, ada juga hubungan yang erat antara kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, peningkatan jumlah uang yang beredar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Namun, jika jumlah uang yang beredar meningkat terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan kebijakannya. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian suku bunga untuk menanggapi kondisi ekonomi yang berubah, baik dalam menghadapi tekanan inflasi maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks global yang semakin terintegrasi, pengaruh kebijakan moneter Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter negara lain, dan aliran modal internasional. Oleh karena itu, analisis yang mendalam tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah uang

beredar dan stabilitas ekonomi di Indonesia sangat penting untuk memahami dinamika perekonomian saat ini.

Salah satu tantangan dalam kebijakan moneter di Indonesia adalah adanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan moneter negara-negara besar, serta ketidakpastian geopolitik dapat berdampak pada perekonomian domestik. Misalnya, ketika harga minyak dunia meningkat, biaya produksi akan naik, yang dapat mendorong inflasi. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan moneternya untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul.

Pentingnya kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi juga terlihat dari pengaruhnya terhadap inflasi. Inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan mengelola jumlah uang beredar, Bank Indonesia berusaha untuk menjaga inflasi dalam batas yang wajar. Data menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1,87%, yang berada dalam target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 2-4%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan berhasil dalam menjaga stabilitas harga (Bank Indonesia, 2021)

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran sektor keuangan dalam implementasi kebijakan moneter. Bank-bank komersial berfungsi sebagai perantara dalam saluran transmisi kebijakan moneter. Ketika Bank Indonesia mengubah suku bunga, bank-bank komersial akan menyesuaikan suku bunga pinjaman dan simpanan mereka. Jika bank tidak merespons perubahan suku bunga dengan cepat, maka

dampak kebijakan moneter tidak akan terasa dalam perekonomian. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam analisis yang lebih mendalam, kita juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan moneter terhadap struktur ekonomi. Misalnya, jika kebijakan moneter terlalu longgar dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan pembentukan gelembung aset, di mana harga aset meningkat secara tidak wajar. Ketika gelembung ini pecah, dampaknya bisa sangat merugikan bagi perekonomian. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap kebijakan moneter sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan.

Pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah uang yang beredar dan stabilitas ekonomi di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perekonomian, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Dalam menghadapi tantangan ini, Bank Indonesia harus terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia mempengaruhi jumlah uang beredar?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia?
3. Apa dampak dari kebijakan moneter terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia?

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, batasan yang digunakan adalah fokus pada kebijakan moneter terhadap jumlah uang yang beredar yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini juga akan membahas dampak dari kebijakan tersebut terhadap jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi, yang diukur melalui indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah uang beredar di Indonesia dalam menjaga inflasi?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter dalam menjaga pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter dalam menjaga nilai tukar rupiah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah uang beredar di Indonesia dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap perubahan jumlah uang beredar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan moneter dalam konteks stabilitas ekonomi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang hubungan antara kebijakan moneter dan jumlah uang beredar dalam konteks ekonomi Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah meliputi :

1. Memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan mengenai efektivitas kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar.
2. Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi dan kebijakan moneter.
3. Menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi dalam memahami dinamika kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi di Indonesia.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Kebijakan Moneter**

###### **2.1.1.1 Definisi dan Tujuan Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar guna merangsang pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi.

Kebijakan moneter di Indonesia juga melibatkan kerjasama dengan kebijakan fiskal. Dalam konteks ini, BI dan pemerintah perlu saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Misalnya, dalam situasi di mana pemerintah meningkatkan belanja untuk proyek infrastruktur, BI perlu mempertimbangkan dampak inflasi dan likuiditas di pasar. Dengan demikian, kebijakan moneter yang efektif harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Kebijakan moneter adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah pengertian kebijakan moneter menurut beberapa ahli antara lain :

a. Muana Nanga

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, dengan tujuan mempengaruhi permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi.

b. Boediono

Kebijakan moneter mencakup tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan dan kesempatan kerja penuh tercapai.

c. M. Natsir

Menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah segala tindakan bank sentral untuk mempengaruhi variabel moneter seperti uang beredar, nilai tukar, dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu.

d. Perry Warjiyo

Menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk agregat moneter yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi dan faktor-faktor mendasar lainnya.

e. Sadono Sukirno

Mengemukakan bahwa kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga di dalam perekonomian.

f. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menyebutkan bahwa kebijakan moneter mencakup semua tindakan pemerintah dan bank sentral yang mempengaruhi kuantitas kredit serta keputusan mengenai penawaran uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*)

Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi ketika ekonomi sedang lesu, BI menjalankan kebijakan ini. Misalnya, resesi pandemi yang dipicu oleh penurunan BI rate. Kebijakan ini akan membantu mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli (permintaan masyarakat). Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga kebijakan moneter akomodatif.

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*)

Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar.

Hal ini mengurangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menurunkan inflasi. Kebijakan moneter kontraktif dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pinjaman dan pengeluaran oleh konsumen dan bisnis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan resesi ekonomi jika diterapkan terlalu agresif.

Dengan kata lain, kebijakan kontraktif adalah jenis kebijakan yang menekankan pada pengurangan jumlah uang beredar untuk mengurangi pengeluaran dan investasi setelahnya sehingga memperlambat perekonomian.

Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi. Dua jenis kebijakan moneter utama adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Berikut adalah perbedaan antara keduanya yang ditunjukkan dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Kebijakan Moneter Ekspansif Dan Kebijakan Moneter Kontraktif**

Perbedaan	Jenis Kebijakan Moneter	
	Kebijakan Moneter Ekspansif	Kebijakan Moneter Kontraktif
Tujuan	Untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, terutama saat ekonomi mengalami resesi atau depresi. Dengan meningkatkan likuiditas, diharapkan bisa mendorong konsumsi dan investasi.	Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Biasanya diterapkan ketika inflasi tinggi atau ketika ada kebutuhan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Metode	Langkah-langkah yang diambil termasuk menurunkan suku bunga, membeli surat berharga pemerintah melalui operasi pasar terbuka, dan mengurangi rasio cadangan wajib bank.	Langkah-langkah termasuk menaikkan suku bunga, menjual surat berharga pemerintah, dan meningkatkan rasio cadangan wajib bank.
Dampak	Penerapan kebijakan ini dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan angka pengangguran. Namun, jika diterapkan secara berlebihan, dapat menyebabkan inflasi.	Kebijakan kontraktif dapat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi daya beli masyarakat dan menekan permintaan. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi jika diterapkan secara agresif.

Perbedaan utama antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif terletak pada tujuan dan dampaknya terhadap perekonomian. Kebijakan ekspansif fokus pada peningkatan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter memiliki tujuan utama yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan antara lain sebagai berikut :

a. Stabilitas Harga

Mengendalikan inflasi agar tidak merugikan daya beli masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengaturan jumlah uang beredar.

c. Kesempatan Kerja

Menciptakan lapangan kerja melalui pengendalian investasi dan konsumsi.

d. Keseimbangan Neraca Pembayaran

Memastikan keseimbangan antara transaksi internasional untuk mendukung stabilitas ekonomi.

Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya serta membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terealisasi dengan cara memberi sumber penerimaan normal dan mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor.

Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Di Indonesia, kebijakan ini diimplementasikan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai upaya untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Mankiw (2016), tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tujuan kebijakan moneter di Indonesia tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi, tetapi juga mencakup pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pada tahun 2022, BI menetapkan target inflasi sebesar  $3\% \pm 1\%$ , yang mencerminkan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Bank Indonesia, 2022). Dengan demikian, kebijakan moneter menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Kebijakan moneter juga berperan dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi, seperti krisis finansial atau resesi. Sebagai contoh, pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, BI mengambil langkah-langkah kebijakan moneter yang agresif dengan menurunkan suku bunga acuan untuk merangsang perekonomian. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan kredit dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi (BI, 2020).

Dalam konteks global, kebijakan moneter juga harus memperhatikan kondisi ekonomi internasional. Fluktuasi suku bunga di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, dapat mempengaruhi aliran modal dan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, BI perlu melakukan evaluasi yang cermat terhadap kebijakan moneter yang diambil, agar dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global sambil tetap menjaga stabilitas domestik (World Bank, 2021).

Dengan demikian, kebijakan moneter di Indonesia berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, termasuk pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini harus

diterapkan secara hati-hati dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik domestik maupun internasional.

### **2.1.1.2 Instrumen Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter dapat dilaksanakan melalui berbagai instrumen yang berfungsi untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga di pasar. Tiga instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib. Masing-masing instrumen memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, yaitu :

#### **1. Suku Bunga**

Suku bunga acuan, yang ditetapkan oleh BI, merupakan salah satu instrumen paling penting dalam kebijakan moneter. Suku bunga ini mempengaruhi biaya pinjaman dan imbal hasil tabungan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat. Penurunan suku bunga acuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan belanja konsumen. Sebagai contoh, setelah BI menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,50% pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam kredit perbankan, yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (BI, 2020).

#### **2. Operasi Pasar Terbuka**

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas di pasar. Dengan membeli surat berharga, BI dapat menambah jumlah uang beredar, sementara penjualan surat berharga dapat mengurangi likuiditas. Pada tahun 2021, BI melakukan operasi pasar terbuka untuk

menstabilkan pasar keuangan di tengah ketidakpastian global. Langkah ini membantu menjaga kestabilan nilai rupiah dan mencegah volatilitas yang berlebihan (BI, 2021).

### 3. Cadangan Wajib

Cadangan wajib adalah persentase tertentu dari simpanan nasabah yang harus disimpan oleh bank di bank sentral. Kebijakan ini berfungsi untuk mengontrol jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank. Dengan meningkatkan cadangan wajib, BI dapat mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan penurunan cadangan wajib dapat meningkatkan likuiditas di pasar. Pada tahun 2022, BI menurunkan rasio cadangan wajib sebagai langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah pemulihan pasca-pandemi (BI, 2022).

Melalui penggunaan instrumen-instrumen ini, Bank Indonesia dapat mengendalikan jumlah uang beredar dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter yang efektif akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang instrumen kebijakan moneter, diharapkan dapat diambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang selalu berubah.

Kebijakan moneter di Indonesia tidak hanya melibatkan pengaturan suku bunga dan likuiditas, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara berbagai instrumen dan dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi. Misalnya, ketika BI menurunkan suku bunga, hal ini tidak hanya berdampak pada biaya pinjaman tetapi juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Penurunan suku

bunga dapat menyebabkan aliran modal keluar jika investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara lain. Oleh karena itu, BI harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam setiap keputusan kebijakan.

Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa kebijakan moneter tidak berfungsi secara terpisah dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, yang melibatkan pengeluaran pemerintah dan pajak, dapat berinteraksi dengan kebijakan moneter untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, hal ini dapat merangsang permintaan agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat, dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali.

Dalam upaya untuk mencapai stabilitas harga, BI juga harus memantau perkembangan inflasi secara berkala. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian dalam ekonomi. Oleh karena itu, BI menggunakan berbagai indikator ekonomi, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP), untuk mengevaluasi tren inflasi dan menyesuaikan kebijakan moneter sesuai kebutuhan.

Kebijakan moneter yang efektif juga memerlukan komunikasi yang jelas antara Bank Indonesia dan masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan moneter dapat membantu membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat memahami tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh BI, mereka lebih mungkin untuk merespons kebijakan tersebut dengan cara yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dalam era digital saat ini, BI juga harus mempertimbangkan dampak teknologi dan inovasi keuangan terhadap kebijakan moneter. Munculnya fintech dan mata uang digital dapat mempengaruhi cara orang bertransaksi dan mengelola uang mereka. Oleh karena itu, BI perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan mempertimbangkan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kebijakan moneter di masa depan.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Dengan memahami definisi, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter secara mendalam, kita dapat menghargai pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang responsif dan efektif akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.

Kebijakan moneter bukan sekadar alat untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi global, interaksi dengan kebijakan fiskal, dan dampak teknologi, Bank Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan moneter akan sangat bergantung pada kemampuan BI untuk beradaptasi dengan perubahan dan responsif terhadap tantangan yang muncul dalam perekonomian domestik dan internasional.

### **2.1.1.3 Sasaran Kebijakan Moneter**

Sasaran kebijakan moneter di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Pertama, sasaran utama kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga diukur melalui tingkat inflasi yang rendah dan stabil, yang merupakan indikator kesehatan ekonomi. BI menetapkan target inflasi tahunan dalam kisaran 2-4%, yang dianggap optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Target ini tidak hanya penting untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kedua, sasaran kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil penting untuk mendukung perdagangan internasional dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, BI melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah yang sempat melemah akibat ketidakpastian global. Dengan menjaga stabilitas nilai tukar, BI berupaya melindungi perekonomian dari gejolak eksternal.

Ketiga, sasaran kebijakan moneter juga mencakup pengaturan jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia berusaha untuk menciptakan kondisi yang mendukung investasi dan konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Melalui penyesuaian suku bunga dan instrumen kebijakan lainnya, BI berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 3,69%, meskipun masih di bawah potensi, namun menunjukkan pemulihan setelah dampak pandemi.

Keempat, kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, BI berkolaborasi dengan OJK dan lembaga terkait lainnya untuk memantau dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Misalnya, dalam menghadapi risiko kredit yang meningkat di sektor perbankan, BI dapat menyesuaikan kebijakan moneter untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup likuiditas untuk menghadapi potensi gagal bayar. Data dari OJK menunjukkan bahwa rasio NPL (Non-Performing Loan) di sektor perbankan tetap di bawah 3%, menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga kesehatan sektor keuangan.

Kelima, sasaran kebijakan moneter juga mencakup peningkatan inklusi keuangan. BI berkomitmen untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Melalui berbagai program dan inisiatif, BI berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan dan akses terhadap produk keuangan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perekonomian, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

## **2.1.2 Jumlah Uang Beredar**

### **2.1.2.1 Definisi Jumlah Uang Beredar Dan Indikatornya**

Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi yang menunjukkan total jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, jumlah uang beredar terdiri dari berbagai komponen yang mencerminkan likuiditas uang di masyarakat. Secara umum, jumlah uang beredar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu M1 dan M2. M1 mencakup uang tunai yang beredar di masyarakat dan simpanan di bank yang dapat segera dicairkan, sedangkan M2 mencakup M1 ditambah dengan simpanan berjangka dan deposito yang memiliki likuiditas lebih rendah. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana uang beredar berfungsi dalam perekonomian.

M1 sering dianggap sebagai ukuran paling sempit dari jumlah uang beredar, karena hanya mencakup uang yang paling likuid. Hal ini berarti bahwa M1 merupakan representasi dari uang yang dapat dengan cepat digunakan untuk transaksi sehari-hari, seperti uang tunai dan saldo di rekening giro. Di sisi lain, M2 memberikan gambaran yang lebih luas tentang jumlah uang beredar dengan memasukkan berbagai bentuk simpanan yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Pada tahun 2022, M1 di Indonesia tercatat mencapai sekitar Rp 1.500 triliun, sedangkan M2 mencapai Rp 6.000 triliun. Data ini menunjukkan bahwa terdapat proporsi yang signifikan antara simpanan yang likuid dan yang tidak likuid

dalam perekonomian Indonesia, yang menjadi indikator penting bagi pengambilan kebijakan oleh Bank Indonesia.

Pentingnya pemahaman tentang jumlah uang beredar terletak pada dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah uang beredar meningkat secara signifikan tanpa diimbangi dengan pertumbuhan output ekonomi, hal ini dapat menyebabkan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu sedikit, perekonomian dapat mengalami deflasi, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pengelolaan jumlah uang beredar menjadi salah satu fokus utama kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga, diharapkan akan ada peningkatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah uang beredar. Penurunan suku bunga membuat biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong individu dan perusahaan untuk meminjam lebih banyak uang untuk investasi dan konsumsi. Hal ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang jumlah uang beredar dan indikatornya seperti M1 dan M2 sangat penting dalam analisis ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif dapat membantu menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pemantauan dan analisis yang cermat terhadap jumlah uang beredar menjadi kunci bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan ekonomi.

#### **2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar**

Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Ketika Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga, hal ini biasanya akan mendorong perbankan untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, hal ini dapat mengurangi jumlah uang beredar karena biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menghambat permintaan kredit.

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai uang, sehingga mereka cenderung untuk mengurangi simpanan dan lebih memilih untuk menghabiskan uang mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah

uang beredar dalam jangka pendek, tetapi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sesuai, dapat mengarah pada inflasi yang lebih tinggi lagi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,5%, yang merupakan salah satu tantangan bagi kebijakan moneter. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, krisis keuangan global dapat menyebabkan penurunan investasi asing dan pengurangan permintaan ekspor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi likuiditas di dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakannya untuk menjaga stabilitas jumlah uang beredar dan mencegah terjadinya krisis likuiditas. Ketidakpastian global dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, yang dapat berpengaruh negatif terhadap jumlah uang beredar.

Perubahan dalam perilaku masyarakat juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, meningkatnya penggunaan teknologi finansial dan pembayaran digital di Indonesia telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan uang. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, jumlah uang yang beredar dalam bentuk tunai mungkin akan berkurang, meskipun total nilai transaksi tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perilaku masyarakat juga harus diperhatikan dalam analisis jumlah uang

beredar. Masyarakat yang lebih cenderung menggunakan metode pembayaran digital dapat mempengaruhi cara bank dan lembaga keuangan dalam mengelola likuiditas.

Akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan juga berkontribusi terhadap jumlah uang beredar. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan akan uang untuk transaksi juga meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan moneter yang efektif perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar agar dapat menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dan mengkonsumsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah uang beredar.

Pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah uang beredar memiliki implikasi yang signifikan bagi stabilitas ekonomi di Indonesia. Dengan memahami komponen jumlah uang beredar, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, kita dapat melihat bagaimana kebijakan moneter berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sementara pengelolaan jumlah uang beredar yang hati-hati dapat mencegah terjadinya inflasi atau deflasi yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3 Stabilitas Ekonomi**

#### **2.1.3.1 Definisi Stabilitas Ekonomi Dan Indikatornya**

Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara beroperasi dengan efisien, di mana fluktuasi ekonomi, seperti inflasi dan pengangguran, berada pada tingkat yang dapat diterima. Stabilitas ekonomi mencakup beberapa indikator penting, di antaranya adalah inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang stabil dan terkendali adalah salah satu indikator utama stabilitas ekonomi. Menurut Bank Indonesia, inflasi yang ideal berkisar antara 2% hingga 4% per tahun. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan menurun, sedangkan inflasi yang terlalu rendah dapat mengindikasikan kurangnya permintaan dalam perekonomian (Bank Indonesia, 2022).

Stabilitas ekonomi merupakan suatu kondisi yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi tidak hanya mencakup ketersediaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang ada. Ketika stabilitas ekonomi terjaga, masyarakat dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, baik dalam hal investasi, konsumsi, maupun tabungan. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu indikator utama dari stabilitas ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang sehat biasanya diukur melalui produk domestik bruto (PDB) suatu negara. PDB yang meningkat menunjukkan

bahwa perekonomian sedang berkembang, dan ini berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya, negara-negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan PDB yang stabil, seperti Tiongkok dan India dalam beberapa dekade terakhir, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam standar hidup masyarakatnya. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan pajak yang dapat digunakan pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur dan layanan publik.

Selanjutnya, stabilitas ekonomi juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan investor. Ketika investor merasa yakin terhadap kondisi ekonomi, mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi. Sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan investor menarik diri dan menunda keputusan investasi mereka. Sebagai contoh, selama periode krisis ekonomi global pada tahun 2008, banyak investor yang ragu untuk berinvestasi karena ketidakpastian yang melanda pasar. Hal ini menyebabkan penurunan investasi yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas ekonomi menjadi kunci untuk menarik investasi asing dan domestik.

Selain itu, stabilitas ekonomi juga berhubungan erat dengan kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter yang bijaksana dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga nilai mata uang, sementara kebijakan fiskal yang efektif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan program sosial. Misalnya, saat pemerintah menginvestasikan dana dalam proyek infrastruktur, hal ini tidak hanya menciptakan

lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi perekonomian dengan memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Keseimbangan neraca perdagangan juga merupakan indikator penting dari stabilitas ekonomi. Neraca perdagangan yang sehat menunjukkan bahwa negara mampu mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diimpornya, yang dapat memperkuat mata uang dan meningkatkan cadangan devisa. Sebuah negara dengan neraca perdagangan yang defisit dapat menghadapi risiko krisis valuta asing, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong ekspor dan mengelola impor dengan bijaksana.

Selain indikator-indikator di atas, stabilitas ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global dan perubahan teknologi. Misalnya, globalisasi telah menciptakan peluang baru bagi negara-negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, tetapi juga membawa tantangan baru, seperti persaingan yang lebih ketat. Negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini cenderung lebih mampu mempertahankan stabilitas ekonominya. Contohnya, negara-negara Skandinavia telah berhasil mengimplementasikan kebijakan yang fleksibel dan inovatif untuk menghadapi tantangan global, sehingga mereka mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dalam konteks global, stabilitas ekonomi juga berkaitan dengan kerjasama internasional. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat lintas batas, seperti krisis keuangan dan perubahan iklim. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang

memberikan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengadopsi praktik terbaik dalam mengelola perekonomian mereka.

Analisis mendalam mengenai stabilitas ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Misalnya, program-program yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi.

Di sisi lain, aspek lingkungan juga tidak bisa diabaikan dalam pembahasan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Contohnya, negara-negara yang berinvestasi dalam energi terbarukan tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor hijau.

Stabilitas ekonomi adalah suatu kondisi yang kompleks dan multidimensional. Indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi, kepercayaan investor, kebijakan moneter dan fiskal, neraca perdagangan, serta faktor eksternal dan sosial lingkungan semuanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi suatu negara. Untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3.2 Hubungan Antara Kebijakan Moneter, Jumlah Uang Beredar Dan Stabilitas Ekonomi**

Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah suku bunga acuan, yang mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan di masyarakat. Ketika BI menurunkan suku bunga, diharapkan jumlah uang yang beredar meningkat, sehingga mendorong konsumsi dan investasi (Bank Indonesia, 2022).

Jumlah uang beredar yang meningkat dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu sedikit, perekonomian dapat mengalami stagnasi, dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan moneter yang efektif harus mampu menemukan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga inflasi tetap terkendali. Contoh nyata dari hubungan ini terjadi pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda. Untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan, BI mengambil langkah-langkah untuk menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas di pasar. Hasilnya, meskipun inflasi sempat meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu pulih dengan baik pada tahun 2021, dengan PDB tumbuh sebesar 3,69% (BPS, 2021). Keputusan BI untuk menurunkan suku bunga merupakan langkah strategis yang diambil dalam situasi krisis, di mana banyak sektor ekonomi tertekan akibat pembatasan sosial dan penurunan permintaan.

Namun, tantangan tetap ada. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami tekanan inflasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga komoditas global dan gangguan pasokan. Oleh karena itu, BI harus terus memantau dan menyesuaikan kebijakannya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan moneter yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, ketika harga bahan pangan meningkat akibat cuaca ekstrem atau gangguan rantai pasokan, BI perlu mempertimbangkan dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Secara keseluruhan, hubungan antara kebijakan moneter, jumlah uang beredar, dan stabilitas ekonomi sangat kompleks dan saling terkait. Kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat memperburuk kondisi ekonomi dan mengganggu stabilitas yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk terus melakukan analisis mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian.

Dalam konteks global, stabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi geopolitik. Misalnya, ketika Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan suku bunga, hal ini dapat menyebabkan aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak dari perubahan ini dapat dirasakan melalui peningkatan nilai tukar dolar AS, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi domestik. Oleh karena itu, penting bagi BI untuk tidak hanya fokus pada kondisi domestik, tetapi juga memperhatikan dinamika global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Stabilitas ekonomi adalah kondisi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara. Indikator-indikator seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan moneter yang efektif, termasuk pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, merupakan kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan global dan domestik, penting bagi pengambil kebijakan untuk tetap responsif dan adaptif, agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul, “Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Jumlah Uang Beredar Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Indonesia”, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Salsabila Azky, Rindi Anita, Nurul Rizka Oktaviani. (2024)	Peranan Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Indonesia	Kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan mengelola tingkat suku bunga dan kebijakan moneter dapat membantu mengelola siklus bisnis dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi yang berlebihan.
2.	Farida Syah Damanik, Gladis Jelita Uzlah Hansel Bahrin Hasibuan, Maryam Batubara, (2024)	Pengaruh Kebijakan Ekonomi Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Kebijakan moneter memiliki efek yang besar dan cara kerjanya mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan moneter dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

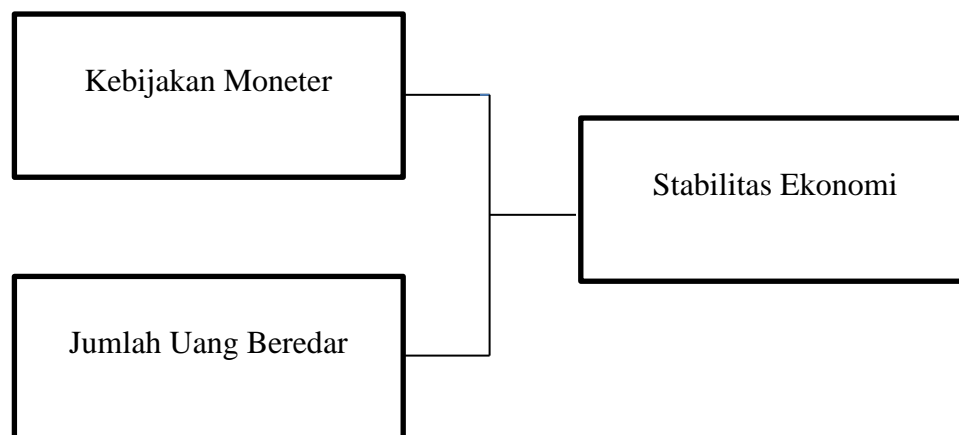
3.	Anita Latuheru, Jenny Ricardo Parera, (2024)	Pengaruh Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
4.	Abdulah Safe'I, Ai Nurendah, (2024)	Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter	Menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan jumlah uang yang beredar.
5.	Fanisa Azzahra, Jeane Agretta Mandalika, M. Faathir FY, Yenni Samri Juliaty, (2024)	Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia	Pertama, jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan pada perkembangan ekonomi negara karena, ketika jumlah uang beredar tinggi maka hal itu berakibat pada meningkatnya inflasi dan menurunnya perkembangan ekonomi negara. Kedua, suku bunga memiliki pengaruh negative dan signifikan pada perkembangan ekonomi negara Indonesia, karena ketika tingkat suku bunga tinggi maka dapat menurunkan permintaan agregat sehingga akan menurunkan perkembangan ekonomi negara. Ketiga, Nilai kurs

			suatu mata uang memiliki pengaruh secara positif serta juga signifikan pada perkembangan ekonomi Indonesia yang artinya ketika nilai tukar mata uang meningkat maka akan meningkatkan perkembangan ekonomi negara.
--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan inflasi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang mencakup stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan moneter terhadap jumlah uang beredar yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi di Indonesia." Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan dalam kebijakan moneter akan berdampak langsung pada jumlah uang yang beredar, yang selanjutnya mempengaruhi variabel-variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.